

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang dilakukan oleh penulis di bab II dan III, beberapa argumen utama di bab I telah terbukti. Strategi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia seperti fasilitas insentif fiskal dan finansial di Bab I, administrasi yang efisien, pembentukan lembaga promosi investasi, kebijakan *clustering*, dan pembentukan Zona Pemrosesan Ekspor di Bab II. Pemerintah Indonesia selaku pemerintah *host country* telah melakukan berbagai kebijakan dalam menarik FDI di sektor nikel. Kebijakan yang dilakukan merupakan hasil sinergi yang dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Investasi, Kementerian Perdagangan, dan BKPM. Dalam hal ini, setiap pihak memiliki fungsinya tersendiri dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu meningkatkan jumlah calon investor di sektor nikel. Seluruh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga sejalan dengan argumentasi yang ditulis oleh Te Velde dalam *chapter*-nya.

Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu fasilitas insentif fiskal dan finansial. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan pembebasan bea masuk terhadap impor mesin selama dua tahun. Hal ini dilakukan disebabkan oleh masih bergantungnya berbagai mesin dalam pemurnian atau peleburan pada mesin yang berasal dari luar Indonesia. Mesin yang tergolong pada pembebasan bea masuk tersebut meliputi peleburan dari *lateritic ore* menjadi

feronikel dan *nickel matte* untuk menghasilkan baja tahan karat. Selain itu, kriteria lainnya yang memenuhi fasilitas penghapusan bea masuk ini bertujuan agar menggiatkan proses industri nikel mulai dari eksplorasi hingga menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi

Kebijakan lainnya yaitu adanya kemudahan dalam perizinan yang dilakukan secara efektif, sederhana, dan transparan. Suatu perusahaan nikel perlu menyediakan dana reklamasi pascatambang sebagai salah satu persyaratan proses administrasi. Dalam kemudahan proses administrasi, perusahaan yang bergerak di sektor nikel dapat membentuk program bersama UMKM dalam pengolahan limbah. Pengolahan limbah ini dapat mengubah limbah nikel menjadi barang dengan nilai ekonomi yang tinggi. Adanya kemudahan dalam proses administrasi juga telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui *monitoring system*. Sistem yang telah berjalan di Indonesia yaitu melalui *One System Submission*, yaitu proses administrasi satu pintu. *Monitoring System* ini berfokus pada proses administrasi bagi perusahaan yang bergerak di sektor eksplorasi *nickel ore* melalui *Minerba One Map Indonesia* dan *Minerba Online Monitoring System* atau MOMS.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia lainnya yaitu pembentukan Lembaga Promosi Investasi di bawah naungan BKPM. Lembaga Promosi Investasi tersebut melakukan berbagai program kerja dalam upayanya menarik FDI di sektor nikel. Lembaga ini memiliki misi untuk mengatasi kesalahpahaman atau misinformasi yang terjadi disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara para calon investor dan pemerintah Indonesia. Dalam sektor nikel, perusahaan yang bergerak di sektor nikel diwajibkan untuk berkolaborasi

dengan mitra UMKM. UMKM dapat memproduksi pipa, katup, atau komponen mesin lainnya. Selain itu, UMKM dapat berperan sebagai mitra dalam mengolah limbah peleburan nikel menjadi bahan siap jual. Akan tetapi, pada saat ini pemerintah Indonesia masih belum membangun lembaga promosi investasi yang berfokus pada industri nikel. Pemerintah Indonesia hanya membentuk lembaga promosi yang berfokus pada mineral dan batubara secara umum. Sehingga, tidak adanya pembangunan lembaga promosi investasi ini tidak dapat dibuktikan secara implementatif.

Dalam upayanya menarik FDI, pemerintahan Indonesia juga telah membentuk *clustering* atau kawasan industri terpusat. Kawasan industri terpusat dibutuhkan dalam proses eksplorasi *nickel ore* menjadi baja tahan karat dan barang produksi siap jadi lainnya. Keuntungan dari adanya kawasan industri terpusat adalah minimnya anggaran untuk transportasi antara perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dengan perusahaan yang bergerak di bidang bahan setengah jadi hingga bahan jadi. Namun, dalam pengoperasian kawasan industri terpusat diperlukan syarat dan ketentuan yang wajib untuk perusahaan nikel patuhi.

Upaya lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu adanya Zona Pemrosesan Ekspor. Adanya Zona Pemrosesan Ekspor ini merupakan salah satu bentuk liberalisasi pasar tanpa pajak dan persyaratan tertentu. Akan tetapi, di Zona Pemrosesan Ekspor, nikel yang diekspor tidak diperbolehkan untuk keperluan penelitian ataupun pemurnian. Hal ini disebabkan oleh pemurnian harus dilakukan oleh pemerintah *host country* melalui *smelter* nikel yang telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

4.2 Saran

Terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus pada strategi pemerintah Indonesia dalam menarik FDI, penelitian-penelitian tersebut memiliki sudut pandang pemerintah Indonesia yang mendapat investasi dari pemerintah Tiongkok. Pada penelitian ini, penulis telah berkontribusi dalam memberikan sudut pandang dan sektor yang berbeda. Penulis menggunakan sudut pandang pemerintah Indonesia dalam menarik FDI dalam sektor nikel. Selain itu, penelitian ini menggunakan strategi dan kebijakan oleh Te Velde. Pada penelitian ini, penulis sadar bahwa memiliki beberapa kekurangan di bidang data terkait perusahaan sebagai bentuk implementasi dari regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga, saran penulis untuk penelitian-penelitian selanjutnya yaitu menganalisis strategi pemerintah Indonesia untuk menarik FDI pada sektor pertambangan lainnya. Selain itu, penelitian-penelitian selanjutnya dapat menganalisis aktivitas *upstream* dan *downstream* pada sektor nikel, terutama pada implementasi pembangunan baterai *Electronic Vehicle* (EV) di Indonesia dan menganalisis lembaga promosi investasi yang berfokus di sektor nikel apabila terbentuk.